

# STATISTIK POTENSI DESA PROVINSI MALUKU UTARA 2019



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI MALUKU UTARA**



# STATISTIK POTENSI DESA PROVINSI MALUKU UTARA 2019





# STATISTIK POTENSI DESA PROVINSI MALUKU UTARA 2019

ISBN : 978-602-6755-74-2  
No. Publikasi : 82520.2004  
Katalog BPS : 1105014.82  
Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm  
Jumlah Halaman : viii + 47 Halaman  
Naskah : Bidang Statistik Sosial  
Desain Sampul : Bidang IPDS  
Diterbitkan Oleh : ©BPS Provinsi Maluku Utara  
Tahun : 2020

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/ataumenggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.**

## **TIM PENYUSUN**

### **Statistik Potensi Desa Provinsi Maluku Utara 2019**

**Penanggung Jawab Umum :**

Atas Parlindungan Lubis S.Si, M.Si

**Penanggung Jawab Teknis :**

Insaf Santosio SST, M.Si

**Penyunting :**

Dwi Cahyadi, SST

**Penulis :**

Yudia Pratidina Hasibuan, SST

**Pengolah Data :**

Yudia Pratidina Hasibuan, SST

**Desain :**

Yudia Pratidina Hasibuan, SST

## KATA PENGANTAR

Statistik Potensi Desa Provinsi Maluku Utara 2019 merupakan publikasi yang menyajikan hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (*Updating Podes*) Provinsi Maluku Utara tahun 2019. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Maluku Utara menurut ketersediaan infrastruktur dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah tersebut.

Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dikelompokkan ke dalam bagian-bagian sebagai berikut: keterangan umum desa, perumahan dan lingkungan hidup,antisipasi dan kejadian bencana alam, pendidikan dan kesehatan, hiburan dan olahraga, angkutan, komunikasi dan informasi serta ekonomi.

Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan data dan informasi terkait infrastruktur dan potensi wilayah bagi para pengambil kebijakan pembangunan di pusat maupun di daerah, peneliti, akedemisi, serta pemakai data pada umumnya.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan *Updating Podes* 2019 hingga tersusunnya publikasi ini. Kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pengguna publikasi ini untuk perbaikan pada edisi di masa mendatang.

Ternate, 06 Oktober 2020  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI MALUKU UTARA



**Atas Parlindungan Lubis S.Si, M.Si**



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vi
Penjelasan Umum Pendataan Potensi Desa 2019.....	1
1. Keterangan Umum Desa.....	5
2. Perumahan dan Lingkungan Hidup .....	9
3. Antisipasi dan Kejadian Bencana Alam .....	17
4. Pendidikan dan Kesehatan.....	23
5. Hiburan dan Olahraga .....	31
6. Angkutan, Komunikasi, dan Informasi.....	35
7. Ekonomi .....	41

## DAFTAR TABEL

### 1. Keterangan Umum Desa

- 1.1 Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Terendah Menurut Status Pemerintahan.....8

### 2. Perumahan dan Lingkungan Hidup

- 2.1 Banyaknya Desa Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik..... 12
- 2.2 Banyaknya Desa Menurut Jenis Bahan Bakar Untuk Memasak Yang Digunakan Oleh Sebagian Besar Keluarga ..... 13
- 2.3 Banyaknya Desa Menurut Sumber Air minum Sebagian Besar Keluarga ..... 14
- 2.4 Banyaknya Desa Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Sebagian Keluarga ..... 15
- 2.5 Banyaknya Desa Menurut Keberadaan Sungai ..... 15

### 3. Antisipasi dan Kejadian Bencana Alam

- 3.1 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam..... 21
- 3.2 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kejadian Bencana Alam..... 22

### 4. Pendidikan dan Kesehatan

- 4.1 Banyaknya Desa/Kelurahan Yang Mempunyai Sekolah.. 28
- 4.2 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Kesehatan..... 29

**5. Hiburan dan Olahraga**

5.1 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Fasilitas/ Lapangan Olahraga ..... 33

**6. Angkutan, Komunikasi, dan Informasi**

6.1 Banyaknya Desa/ Kelurahan Menurut Jenis Prasarana Transportasi Dan Ketersediaan Angkutan Umum..... 38

6.2 Banyaknya Desa/Kelurahan Yang Menggunakan Prasarana Transportasi Darat Atau Darat Dan Air Menurut Jenis Permukaan Jalan Darat Terluas ..... 40

6.3 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sinyal Telepon Seluler/Handphone Di Sebagian Besar Wilayah Desa/Kelurahan..... 40

**7. Ekonomi**

7.1 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Koperasi ..... 44

7.2 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Kelompok Pertokoan Dan Pasar ..... 45

7.3 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Bank..... 46



## **Penjelasan Umum Pedataan Pemutakhiran Data**

### ***Updating Podes 2019***

1. Data pada publikasi ini berdasarkan hasil pendataan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (*Updating Podes*) 2019 yang dilakukan pada 10 Juni – 5 Juli 2019. Pendataan Potensi Desa (Podes) telah dilaksanakan sejak tahun 1980. Pengumpulan data Podes dilakukan sebanyak tiga kali dalam kurun waktu sepuluh tahun, sebagai bagian dari siklus sepuluh tahunan kegiatan sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Podes dilaksanakan dua tahun sebelum pelaksanaan sensus untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus. Pada tahun berakhiran ‘1’, pendataan Podes dilaksanakan untuk mendukung Sensus Pertanian yaitu identifikasi wilayah konsentrasi usaha pertanian menurut sektor dan subsektor. Pada tahun berakhiran ‘4’, Podes dilaksanakan untuk mendukung Sensus Ekonomi dalam rangka identifikasi usaha menurut sektor dan subsektor. Pada tahun berakhiran ‘8’, Podes dilaksanakan untuk mendukung Sensus Penduduk yaitu untuk identifikasi wilayah permukiman baru. Mendesaknya kebutuhan data Podes yang *ter-update* setiap tahun, maka BPS perlu melakukan *Updating* data Podes. Kegiatan ini disebut dengan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (*Updating Podes 2019*), yang dilaksanakan setiap tahun diluar tahun pendataan Podes.
  
2. Tujuan kegiatan pemutakhiran data perkembangan desa secara umum adalah untuk menghasilkan data bagi keperluan pembangunan wilayah, memberikan data tentang potensi wilayah, ketersediaan infrastruktur/fasilitas, serta kondisi sosial-ekonomi di setiap desa/kelurahan. Adapun

tujuan khusus kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa adalah:

- 1) Menyediakan data dasar untuk menghitung Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang nantinya akan dipergunakan sebagai salah satu variabel dalam pengalokasian Dana Desa (DD).
  - 2) Menyediakan data untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan perencanaan wilayah di tingkat nasional dan tingkat daerah.
  - 3) Menyediakan data tentang keberadaan dan perkembangan potensi yang dimiliki desa/kelurahan yang meliputi: pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan aksesibilitas/transportasi.
  - 4) Menyediakan data dukung untuk penyusunan Daerah Dalam Angka (DDA).
  - 6) Menyediakan data untuk kepentingan penghitungan Urban/Rural.
3. Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2019 dilaksanakan secara sensus terhadap seluruh kabupaten/kota, kecamatan, dan wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa (wilayah administrasi setingkat desa yang dimaksud, yaitu: desa, kelurahan, UPT/SPT di Indonesia dan nagari (khusus Provinsi Sumatera Barat). Dalam perencanaannya, Pemutakhiran Data Perkembangan Desa dirancang berdasar Rekap Desa (RD) kondisi 22 Mei 2019.
4. Suatu wilayah administrasi pemerintahan ditetapkan sebagai target lokasi pendataan jika wilayah tersebut telah dinyatakan sebagai wilayah yang definitif dan operasional dengan kriteria sebagai berikut: (1) memiliki batas wilayah yang jelas, (2) memiliki penduduk yang menetap di wilayahnya, dan (3) memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat.
5. Instrumen *Updating* Podes 2019 yang digunakan adalah aplikasi *Updating*

Podes 2019 dan Buku Pedoman. Buku Pedoman terdiri dari tiga, yaitu; Pedoman Kepala BPS Provinsi/BPS Kabupaten/Kota, Pedoman Pencacah, dan Pedoman Pengawas/Pemeriksa.

6. Pengumpulan data *Updating* Podes 2019 dilakukan melalui wawancara langsung oleh petugas terlatih dengan narasumber yang relevan di wilayah pencacahan serta penelusuran dokumen terkait. Petugas wawancara adalah aparatur ataupun mitra kerja BPS Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan lulus pelatihan pendataan Podes 2019. Sementara itu, narasumber yang dipilih adalah beberapa orang yang memiliki pengetahuan, kewenangan, dan tanggung jawab terhadap wilayah target pencacahan. Kemajuan pendataan dilaporkan dan dipantau secara langsung melalui web.
7. Pengolahan data *Updating* Podes 2019 dilakukan sekaligus pada saat pencacahan, karena telah menggunakan aplikasi *Updating* Podes 2019. Jika data tersebut dinyatakan *clean* oleh aplikasi, maka proses selanjutnya adalah mengirimkan data tersebut ke server. Dalam rangka menjamin kualitas data maka dilakukan pemeriksaan melalui aplikasi server yang terhubung aplikasi pendataan. Pemeriksaan data dilakukan secara bertingkat baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, sampai dengan tingkat BPS Pusat.



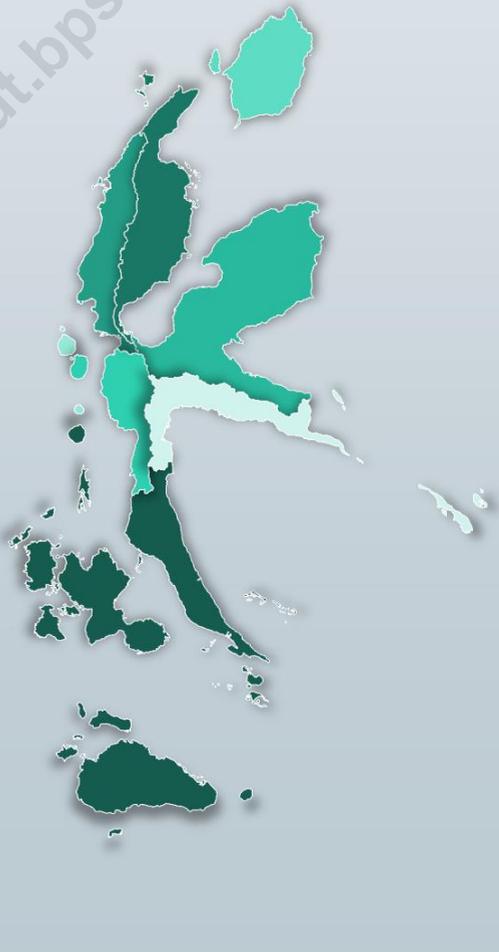
# 1

# KETERANGAN UMUM DESA



BANYAKNYA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERENDAH  
(DESA/KELURAHAN/UPT/SPT)  
MENURUT KABUPATEN

Halmahera Selatan	256
Halmahera Utara	199
Halmahera Barat	169
Halmahera Timur	104
Tidore Kepulauan	90
Pulau Morotai	88
Kepulauan Sula	80
Ternate	78
Pulau Taliabu	71
Halmahera Tengah	64





## Penjelasan Teknis Keterangan Umum Desa

1. **Desa** adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat di desa tersebut.
2. **Kelurahan** adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah).
3. **Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)** adalah satuan permukiman transmigrasi yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat usaha transmigran yang sejak awal direncanakan untuk membentuk suatu desa atau bergabung dengan desa setempat. Organisasi UPT merupakan kelembagaan yang bersifat sementara dibentuk sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum transmigran ditempatkan dan paling lama 5 tahun (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.22/MEN/IX/2007).

4. **Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT)** adalah satuan permukiman potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang sudah ada atau sedang berkembang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2003 tentang Prosedur dan Kriteria Penyiapan Lokasi Permukiman Transmigasi).

**TABEL 1.1 BANYAKNYA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERENDAH MENURUT STATUS PEMERINTAHAN**

Kabupaten/Kota	Status Pemerintahan			
	Desa	Kelurahan	UPT/SPT	Total
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
Halmahera Barat	169	0	0	169
Halmahera Selatan	250	0	6	256
Halmahera Tengah	61	0	3	64
Halmahera Timur	102	0	2	104
Halmahera Utara	198	0	1	199
Kepulauan Sula	80	0	0	80
Pulau Morotai	88	0	0	88
Pulau Taliabu	71	0	0	71
Ternate	0	78	0	78
Tidore Kepulauan	49	40	1	90
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>1068</b>	<b>118</b>	<b>13</b>	<b>1199</b>

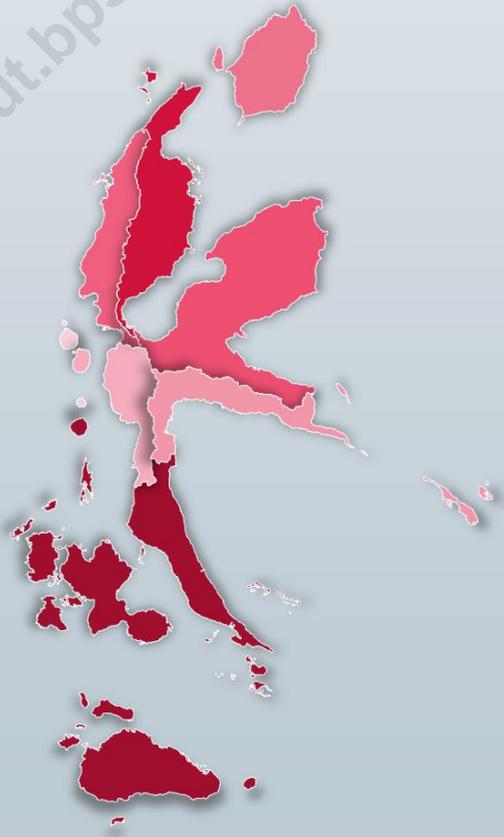
# 2

## PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



BANYAKNYA DESA YANG TERDAPAT KELUARGA BUKAN PENGGUNA LISTRIK

Halmahera Selatan	114
Halmahera Utara	80
Pulau Taliabu	54
Halmahera Timur	51
Halmahera Barat	44
Pulau Morotai	41
Kepulauan Sula	36
Halmahera Tengah	26
Tidore Kepulauan	15
Ternate	6





## Penjelasan Teknis Perumahan dan Lingkungan Hidup

1. **Keluarga Pengguna Listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara)** adalah keluarga pengguna/pelanggan listrik yang disalurkan oleh PLN dengan atau tanpa meteran resmi dari PLN.
2. **Keluarga Pengguna Listrik Non-PLN** adalah keluarga pengguna/pelanggan listrik selain PLN, misalnya diesel/generator, listrik diusahakan oleh pemerintah daerah, swasta, atau listrik swadaya masyarakat.
3. **Keluarga Bukan Pengguna Listrik** adalah keluarga yang tidak menggunakan listrik sebagai sumber energi untuk penerangan rumah.
4. **Jalan Utama Desa** adalah jalan yang dianggap oleh sebagian besar penduduk desa/kelurahan setempat sebagai jalan yang paling penting atau paling sering digunakan untuk arus transportasi dari/ menuju kantor camat terdekat.
5. **Bahan Bakar** adalah jenis bahan yang digunakan untuk memasak oleh mayoritas keluarga di desa/kelurahan.
6. **Sungai** adalah tempat, wadah, dan jaringan air yang terbentuk secara alamiah maupun buatan mulai dari mata air (hulu) sampai muara (hilir) dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sungai yang dimaksud di sini termasuk anak sungai, kanal, dan sodetan (Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011).
7. **Embung** adalah bangunan yang berfungsi menampung kelebihan air

yang terjadi pada musim hujan untuk persediaan suatu desa di musim kering.

8. **Mata air** adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya (alami).

**TABEL 2.1. BANYAKNYA DESA MENURUT KEBERADAAN KELUARGA PENGGUNA LISTRIK**

Kabupaten/Kota	Pengguna Listrik		Bukan Pengguna Listrik
	PLN	Non PLN	
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	151	36	44
Halmahera Selatan	146	127	114
Halmahera Tengah	58	14	26
Halmahera Timur	85	39	51
Halmahera Utara	177	45	80
Kepulauan Sula	67	18	36
Pulau Morotai	78	10	41
Pulau Taliabu	15	52	54
Ternate	76	3	6
Tidore Kepulauan	89	7	15
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>942</b>	<b>351</b>	<b>467</b>

**TABEL 2.2. BANYAKNYA DESA MENURUT JENIS BAHAN BAKAR  
UNTUK MEMASAK YANG DIGUNAKAN OLEH SEBAGIAN  
BESAR KELUARGA**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Minyak Tanah</b>	<b>Kayu Bakar</b>	<b>Total</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Halmahera Barat	33	136	169
Halmahera Selatan	36	220	256
Halmahera Tengah	10	54	64
Halmahera Timur	15	89	104
Halmahera Utara	50	149	199
Kepulauan Sula	16	64	80
Pulau Morotai	38	50	88
Pulau Taliabu	14	57	71
Ternate	68	10	78
Tidore Kepulauan	50	40	90
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>330</b>	<b>869</b>	<b>1199</b>

**TABEL 2.3. BANYAKNYA DESA MENURUT SUMBER AIR MINUM  
SEBAGIAN BESAR KELUARGA**

Kabupaten/Kota	Air Kemasan Bermerk	Air Isi Ulang	Ledeng dengan meteran	Ledeng tanpa meteran	Sumur bor/pompa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Halmahera Barat	33	136	169	14	6
Halmahera Selatan	36	220	256	10	21
Halmahera Tengah	10	54	64	0	1
Halmahera Timur	15	89	104	0	0
Halmahera Utara	50	149	199	8	17
Kepulauan Sula	16	64	80	5	3
Pulau Morotai	38	50	88	6	3
Pulau Taliabu	14	57	71	14	1
Ternate	68	10	78	4	2
Tidore Kepulauan	50	40	90	0	15
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>330</b>	<b>869</b>	<b>1199</b>	<b>61</b>	<b>69</b>

**TABEL 2.3. (Sambungan)**

Kabupaten/Kota	Mata Air	Sungai/Danau/ Kolam/Waduk/ Situ/Embung/ Bendungan	Air Hujan	Lain- nya	Jumlah
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Halmahera Barat	33	136	169	14	6
Halmahera Selatan	36	220	256	10	21
Halmahera Tengah	10	54	64	0	1
Halmahera Timur	15	89	104	0	0
Halmahera Utara	50	149	199	8	17
Kepulauan Sula	16	64	80	5	3
Pulau Morotai	38	50	88	6	3
Pulau Taliabu	14	57	71	14	1
Ternate	68	10	78	4	2
Tidore Kepulauan	50	40	90	0	15
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>330</b>	<b>869</b>	<b>1199</b>	<b>61</b>	<b>69</b>

**TABEL 2.4. BANYAKNYA DESA MENURUT PENGGUNAAN FASILITAS TEMPAT BUANG AIR BESAR SEBAGIAN KELUARGA**

Kabupaten/Kota	Jamban			Bukan Jamban	Jumlah
	Sendiri	Bersama	Umum		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Halmahera Barat	128	11	27	3	169
Halmahera Selatan	155	17	53	31	256
Halmahera Tengah	52	1	9	2	64
Halmahera Timur	57	15	31	1	104
Halmahera Utara	133	12	45	9	199
Kepulauan Sula	73	3	1	3	80
Pulau Morotai	60	10	8	10	88
Pulau Taliabu	47	0	3	21	71
Ternate	78	0	0	0	78
Tidore Kepulauan	84	0	6	0	90
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>867</b>	<b>69</b>	<b>183</b>	<b>80</b>	<b>1199</b>

**TABEL 2.5. BANYAKNYA DESA MENURUT KEBERADAAN SUNGAI**

Kabupaten/Kota	Ada	Tidak ada	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	99	70	169
Halmahera Selatan	181	75	256
Halmahera Tengah	44	20	64
Halmahera Timur	85	19	104
Halmahera Utara	116	83	199
Kepulauan Sula	63	17	80
Pulau Morotai	44	44	88
Pulau Taliabu	52	19	71
Ternate	2	76	78
Tidore Kepulauan	78	12	90
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>764</b>	<b>435</b>	<b>1199</b>



# 3

## ANTISIPASI DAN KEJADIAN BENCANA ALAM



BANYAKNYA DESA/KELURAHAN YANG MENERAPKAN SISTEM PERINGATAN DINI BENCANA ALAM

Pulau Morotai	83
Ternate	30
Halmahera Timur	13
Halmahera Utara	12
Halmahera Barat	11
Halmahera Selatan	8
Kepulauan Sula	2
Tidore Kepulauan	2
Halmahera Tengah	1
Pulau Taliabu	1





## Penjelasan Teknis Antisipasi dan Kejadian Bencana Alam

1. **Bencana alam** adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa bencana yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dan dirinci setiap tahun, yaitu 2015, 2016, dan 2017. Dalam suatu kejadian bencana alam dapat menimbulkan beberapa peristiwa alam lainnya seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor sehingga mengakibatkan kerugian materi maupun non-materi.
2. **Sistem Peringatan Dini Bencana Alam** adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana alam pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Sistem peringatan dini bencana alam yang dimaksud, misalnya peringatan dini terhadap warga mengenai status ketinggian pintu air, status gunung, d.s.b yang disampaikan melalui kentongan, pemberitahuan dengan *loud speaker*, dan lainnya.
3. **Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, d.l.l.** Kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu contoh yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan bencana. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
4. **Sistem Peringatan Dini Tsunami** adalah fasilitas pendeteksian kejadian bencana alam tsunami untuk memberikan peringatan dini sebelum bencana alam tsunami datang/menimpa desa/kelurahan. Sistem ini menggunakan peralatan teknologi tinggi sebagai alat atau

sarana untuk memonitor kapan dan di mana bencana alam tsunami itu akan terjadi. Cakupan wilayah sistem peringatan dini tsunami meliputi semua desa/kelurahan yang dapat dijangkau oleh sistem tersebut dan bukan hanya desa/kelurahan dimana lokasi alat tersebut berada.

5. **Perlengkapan Keselamatan** adalah perlengkapan yang diupayakan/disediakan oleh aparat setempat maupun warga desa untukantisipasi maupun evakuasi korban saat terjadi bencana alam, seperti: perahu karet, tenda, persediaan masker, dan sebagainya.
6. **Rambu-rambu dan Jalur Evakuasi** adalah rambu-rambu/tanda dan jalur atau rute khusus yang digunakan untuk evakuasi pada saat terjadi bencana alam. Rambu-rambu dan jalur atau rute ini bisa tersedia di desa/kelurahan dalam bentuk apapun, misal peta, petunjuk evakuasi, dan lokasi aman untuk berkumpul (*muster point*). Hal yang terpenting adalah jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam, warga desa/kelurahan tahu jalur atau rute evakuasi yang harus dilewati.

**TABEL 3.1. BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT UPAYA ANTISIPASI/MITIGASI BENCANA ALAM**

Kabupaten/Kota	Sistem Peringatan Dini Bencana Alam	Bukan Wilayah Tsunami	Sistem Peringatan Dini Khusus Tsunami
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	11	36	1
Halmahera Selatan	8	9	1
Halmahera Tengah	1	10	1
Halmahera Timur	13	15	2
Halmahera Utara	12	11	3
Kepulauan Sula	2	27	0
Pulau Morotai	83	2	9
Pulau Taliabu	1	0	1
Ternate	30	1	5
Tidore Kepulauan	2	4	0
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>163</b>	<b>115</b>	<b>23</b>

**TABEL 3.1. (Sambungan)**

Kabupaten/Kota	Perlengkapan Keselamatan	Rambu-rambu dan Jalur Evakuasi Bencana	Pembuatan, Perawatan atau Normalisasi Sungai, Kanal, Tanggul, Parit, Drainase, Waduk, Pantai, dll
(5)	(6)	(7)	(8)
Halmahera Barat	0	36	47
Halmahera Selatan	1	21	102
Halmahera Tengah	1	0	8
Halmahera Timur	1	7	30
Halmahera Utara	1	42	67
Kepulauan Sula	0	5	29
Pulau Morotai	0	16	16
Pulau Taliabu	0	6	8
Ternate	1	56	16
Tidore Kepulauan	0	14	34
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>5</b>	<b>203</b>	<b>357</b>

**TABEL 3.2. BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEJADIAN BENCANA ALAM**

Kabupaten/Kota	Banjir	Banjir Bandang	Gempa Bumi	Tsunami	gelombang pasang laut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Halmahera Barat	33	4	21	0	7
Halmahera Selatan	43	1	88	0	22
Halmahera Tengah	8	0	7	0	2
Halmahera Timur	16	1	19	0	12
Halmahera Utara	30	4	39	0	8
Kepulauan Sula	8	0	0	0	13
Pulau Morotai	17	0	59	0	10
Pulau Taliabu	21	0	20	0	6
Ternate	3	0	0	0	0
Tidore Kepulauan	12	0	39	0	2
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>191</b>	<b>10</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>82</b>

**TABEL 3.2. (Sambungan)**

Kabupaten/Kota	angin puyuh/puting beliung/topan	gunung meletus	kebakaran hutan dan lahan	Kekerangan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)
Halmahera Barat	2	15	2	2
Halmahera Selatan	7	0	2	11
Halmahera Tengah	3	0	1	3
Halmahera Timur	2	0	2	5
Halmahera Utara	8	0	6	8
Kepulauan Sula	1	0	0	0
Pulau Morotai	4	0	2	3
Pulau Taliabu	1	0	3	4
Ternate	2	0	0	0
Tidore Kepulauan	2	0	2	2
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>32</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>38</b>

# 4

## PENDIDIKAN DAN KESEHATAN



BANYAKNYA DESA/KELURAHAN YANG BELUM MEMPUNYAI TK/PAUD

Halmahera Selatan	14
Halmahera Utara	12
Pulau Morotai	8
Halmahera Timur	7
Halmahera Barat	4
Halmahera Tengah	1
Pulau Taliabu	1
Kepulauan Sula	0
Ternate	0
Tidore Kepulauan	0





## Penjelasan Teknis Pendidikan dan Kesehatan

1. **Jenjang Pendidikan Formal** terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.
  - a. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
  - b. Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
  - c. Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
2. **Jenjang Pendidikan Nonformal** meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan

kemampuan peserta didik, satuan pendidikan formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

- a. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) atau biasa disebut PAUD adalah tempat kegiatan pembinaan anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan/ perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini).
  - b. Kelompok Bermain (*Play Group*) adalah pendidikan anak-anak usia 2-6 tahun yang berfungsi untuk membantu meletakkan dasar-dasar ke arah.
3. **Rumah Sakit** adalah sarana kesehatan/ bangunan tempat untuk melayani penderita yang sakit untuk berobat rawat jalan atau rawat inap yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya.
  4. **Rumah Sakit Bersalin** adalah rumah sakit khusus untuk persalinan, dilengkapi pelayanan spesialis pemeriksaan kehamilan, persalinan, rawat inap, dan rawat jalan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan dokter spesialis kandungan.
  5. **Puskesmas** adalah unit pelayanan kesehatan milik pemerintah (pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/ kota) yang bertanggung

jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan/desa.

6. **Puskesmas Pembantu (Pustu)** sebagai sarana kesehatan/bangunan yang dipakai sebagai pusat kesehatan masyarakat untuk wilayah yang lebih kecil, misal di desa/kelurahan.
7. **Poliklinik** adalah sarana kesehatan/bangunan yang dipakai untuk pelayanan berobat jalan. Biasanya dikelola oleh swasta atau organisasi keagamaan tertentu.
8. **Tempat Praktek Dokter** adalah sarana Kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktek dokter yang biasanya memberikan pelayanan berobat jalan, termasuk praktik dokter yang mempunyai fasilitas rawat inap dan apotek.
9. **Rumah Bersalin** adalah sarana pelayanan kesehatan dengan izin sebagai rumah bersalin, dilengkapi pelayanan pemeriksaan kehamilan, persalinan serta pemeriksaan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan bidan senior.
10. **Tempat Praktek Bidan** adalah sarana Kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktek bidan yang biasanya memberikan pelayanan ibu hamil dan bayi.
11. **Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)** adalah sarana kesehatan/bangunan yang dibentuk di desa/kelurahan dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan.

12. **Pondok Bersalin Desa (Polindes)** adalah bangunan yang dibangun dengan sumbangan dana pemerintah dan partisipasi masyarakat desa untuk tempat pertolongan persalinan dan pemondokan ibu bersalin, sekaligus tempat tinggal bidan di desa.
13. **Apotek** adalah suatu sarana kesehatan yang digunakan untuk pekerjaan kefarmasian, dan penyaluran/penjualan obat/bahan farmasi.
14. **Toko Khusus Obat/Jamu** adalah tempat tertentu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan menyimpan, dan menjual obat/bahan khusus untuk obat/jamu.
15. **Bidan** adalah seorang petugas paramedis yang memperoleh pendidikan formal mengenai kebidanan dan berdomisili/ tinggal di desa/kelurahan.

**TABEL 4.1. BANYAKNYA DESA/KELURAHAN YANG MEMPUNYAI SEKOLAH**

Kabupaten/Kota	TK/ Paud	SD/ Mi	SMP/ MTs	SMA/ MA	SMK	Akademi/ Univ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Halmahera Barat	165	146	70	27	15	3
Halmahera Selatan	242	247	150	66	26	3
Halmahera Tengah	63	59	36	17	12	1
Halmahera Timur	97	93	51	21	7	0
Halmahera Utara	187	175	90	41	29	6
Kepulauan Sula	80	79	60	25	20	3
Pulau Morotai	80	74	48	26	11	2
Pulau Taliabu	70	65	37	17	6	0
Ternate	78	70	40	21	7	8
Tidore Kepulauan	90	85	47	31	7	3
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>165</b>	<b>146</b>	<b>70</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>3</b>

**TABEL 4.2. BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT  
KEBERADAAN SARANA KESEHATAN**

Kabupaten/Kota	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas dengan rawat inap	Puskesmas Tanpa rawat inap
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Halmahera Barat	1	0	6	9
Halmahera Selatan	3	0	15	22
Halmahera Tengah	1	0	5	5
Halmahera Timur	1	0	9	7
Halmahera Utara	3	0	14	10
Kepulauan Sula	1	0	7	9
Pulau Morotai	1	0	6	2
Pulau Taliabu	2	0	1	8
Ternate	8	0	4	7
Tidore Kepulauan	2	0	5	5
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>84</b>

**TABEL 4.2. (Sambungan)**

Kabupaten/Kota	Puskesmas Pembantu	Poliklinik	Praktek Dokter	Rumah Bersalin
(8)	(6)	(7)	(9)	(10)
Halmahera Barat	11	1	15	0
Halmahera Selatan	24	1	3	0
Halmahera Tengah	39	1	4	0
Halmahera Timur	21	1	8	0
Halmahera Utara	47	1	11	0
Kepulauan Sula	38	1	5	0
Pulau Morotai	41	1	4	0
Pulau Taliabu	30	0	1	0
Ternate	9	3	24	1
Tidore Kepulauan	26	1	8	0
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>286</b>	<b>11</b>	<b>83</b>	<b>1</b>

**TABEL 4.2. (Sambungan)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Bidan</b>	<b>Poskesdes</b>	<b>Polindes</b>	<b>Apotik</b>
<i>(8)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>
Halmahera Barat	2	22	57	9
Halmahera Selatan	4	8	154	8
Halmahera Tengah	0	2	0	3
Halmahera Timur	0	14	25	8
Halmahera Utara	3	20	70	11
Kepulauan Sula	3	9	23	3
Pulau Morotai	0	5	13	3
Pulau Taliabu	0	0	44	1
Ternate	13	26	11	21
Tidore Kepulauan	3	46	8	10
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>28</b>	<b>152</b>	<b>405</b>	<b>77</b>

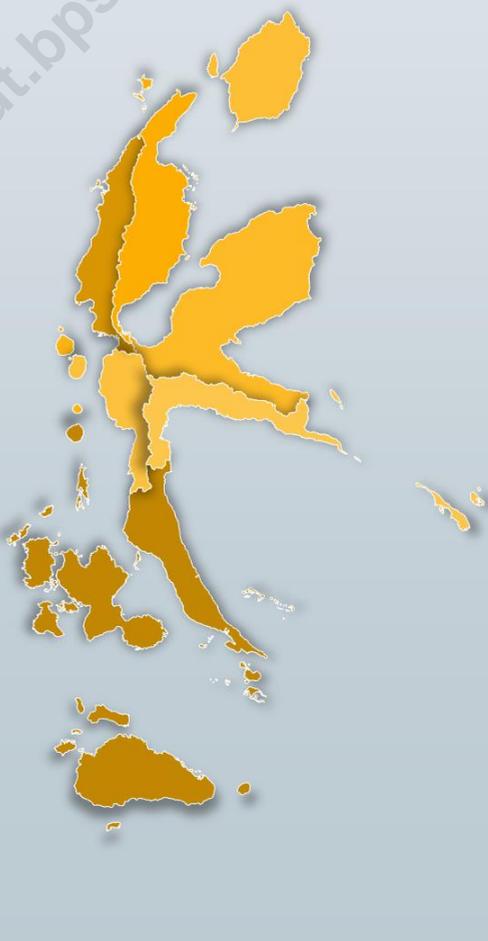
# 5

## HIBURAN DAN OLAHRAGA



BANYAKNYA DESA/KELURAHAN  
YANG TIDAK TERSEDIA FASILITAS/LAPANGAN OLAHRAGA

Halmahera Selatan	88
Halmahera Barat	76
Halmahera Utara	75
Ternate	42
Halmahera Timur	37
Pulau Morotai	33
Tidore Kepulauan	24
Halmahera Tengah	23
Pulau Taliabu	16
Kepulauan Sula	12





## Penjelasan Teknis Hiburan dan Olahraga

1. **Pusat Kebugaran** adalah tempat khusus berolahraga ataupun melakukan aktivitas fisik. Sebuah *fitness centre* yang biasanya menyajikan banyak fasilitas dengan konsep *one stop sport* dan *entertainment* menjadi kunci utamanya.
2. **Lapangan olahraga adalah** tempat lapang untuk kegiatan olahraga yang ada di desa/kelurahan baik yang sesuai dengan persyaratan olahraga yang bersangkutan maupun tidak.

**TABEL 5.1. BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KETERSEDIAAN FASILITAS/LAPANGAN OLAHRAGA**

Kabupaten/Kota	Sepak Bola	Bola Voly	Bulu Tangkis	Basket	Tenis Lapangan	Tenis Meja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Halmahera Barat	93	60	10	0	2	25
Halmahera Selatan	168	125	9	2	1	18
Halmahera Tengah	32	41	4	1	1	3
Halmahera Timur	62	67	19	2	2	2
Halmahera Utara	124	72	7	1	1	12
Kepulauan Sula	58	68	4	3	4	7
Pulau Morotai	55	47	2	0	1	1
Pulau Taliabu	41	55	1	1	1	3
Ternate	36	29	8	4	4	3
Tidore Kepulauan	63	66	14	1	2	9
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>732</b>	<b>630</b>	<b>78</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>83</b>

TABEL 5.1. (Sambungan)

Kabupaten/Kota	Futsal	Renang	Bela diri	Bilyar	Pusat Kebugaran
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Halmahera Barat	4	1	7	3	0
Halmahera Selatan	8	0	2	3	1
Halmahera Tengah	1	0	0	0	1
Halmahera Timur	3	1	0	0	1
Halmahera Utara	5	2	1	9	2
Kepulauan Sula	2	0	0	3	0
Pulau Morotai	1	0	0	0	1
Pulau Taliabu	1	0	0	0	0
Ternate	12	4	2	2	5
Tidore Kepulauan	5	0	4	1	2
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>42</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>13</b>

# 6

## ANGKUTAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI



BANYAKNYA DESA/KELURAHAN YANG DI SEBAGIAN BESAR WILAYAHNYA TIDAK TERJANGKAU SINYAL TELEPON SELULER/HANDPHONE

Halmahera Selatan	26
Halmahera Utara	26
Halmahera Barat	17
Halmahera Timur	15
Halmahera Tengah	10
Kepulauan Sula	9
Pulau Taliabu	9
Ternate	3
Pulau Morotai	0
Tidore Kepulauan	0





## Penjelasan Teknis Angkutan, Komunikasi dan Informasi

1. **Prasarana Transportasi** adalah sarana penunjang lalu lintas pemindahan orang dan atau barang, yang terdiri atas jalan, jembatan, dermaga, pelabuhan, dan lain- lain yang digunakan oleh warga desa untuk mobilitas dari dan ke desa terdekat.
2. **Angkutan Umum** adalah sarana angkutan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan).
3. Jenis Permukaan Jalan Terluas adalah jenis permukaan jalan terluas yang ada di desa/kelurahan. Jenis permukaan jalan terdiri dari: aspal/beton, diperkeras (dengan kerikil atau batu), tanah, dan lainnya yaitu terbuat dari kayu/papan yang biasanya digunakan di daerah rawa, termasuk jalan setapak, jalan di hutan dan sejenisnya.
4. Base Transceiver Station (BTS) adalah alat yang berfungsi sebagai pengirim dan penerima (*transceiver*) sinyal komunikasi seluler. Biasanya BTS ditandai adanya menara/tower yang dilengkapi antena sebagai perangkat transceiver.
5. Sinyal telepon seluler adalah besaran elektromagnetik yang berubah dalam ruang dan waktu dengan membawa informasi yang memberikan konfirmasi bahwa layanan telepon seluler sudah tersedia.
6. Sinyal internet GSM atau CDMA adalah jaringan sistem data paket internet dengan kecepatan transfer data tertentu. Paket data disini biasanya digunakan dalam melakukan akses internet. Protokol transfer

data ini mengalami beberapa perubahan mulai dari yang kecepatannya rendah sampai tinggi yaitu GPRS, *Edge*, HSPA, 3G, kemudian 4G

7. **Kantor Pos** adalah tempat pemberi pelayanan komunikasi tertulis dan atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Rumah pos berfungsi sama seperti kantor pos dan kantor pos pembantu, bedanya rumah pos biasanya terletak di daerah terpencil.
8. **Pos Keliling** adalah pelayanan pos (menjual, mengirim, dan menerima benda pos) keliling dengan menggunakan mobil atau sarana angkutan yang berfungsi sama seperti kantor pos atau kantor pos pembantu.

**TABEL 6.1. BANYAKNYA DESA/ KELURAHAN MENURUT JENIS PRASARANA TRANSPORTASI DAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM**

Kabupaten/Kota	Jenis Sarana Transportasi		
	Darat	Air	Darat dan Air
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	135	18	16
Halmahera Selatan	79	90	87
Halmahera Tengah	46	0	18
Halmahera Timur	82	1	21
Halmahera Utara	171	7	21
Kepulauan Sula	46	6	28
Pulau Morotai	71	7	10
Pulau Taliabu	30	13	28
Ternate	72	0	6
Tidore Kepulauan	89	1	0
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>821</b>	<b>143</b>	<b>235</b>

**TABEL 6.1. (Sambungan)**

Kabupaten/Kota	Ketersediaan Angkutan Umum		
	Ada, dengan trayek tetap	Ada, tanpa trayek tetap	Tidak ada
<i>(1)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
Halmahera Barat	56	77	36
Halmahera Selatan	130	91	35
Halmahera Tengah	43	11	10
Halmahera Timur	11	91	2
Halmahera Utara	110	67	22
Kepulauan Sula	45	25	10
Pulau Morotai	48	21	19
Pulau Taliabu	21	14	36
Ternate	44	32	2
Tidore Kepulauan	74	16	0
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>582</b>	<b>445</b>	<b>172</b>

**TABEL 6.2. BANYAKNYA DESA/KELURAHAN YANG MENGGUNAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DARAT ATAU DARAT DAN AIR MENURUT JENIS PERMUKAAN JALAN DARAT TERLUAS**

Kabupaten/Kota	Aspal/Beton	Diperkeras (kerikil, batu, dll)	Tanah	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Halmahera Barat	133	5	13	0	169
Halmahera Selatan	87	38	41	0	256
Halmahera Tengah	38	13	13	0	64
Halmahera Timur	78	12	13	0	104
Halmahera Utara	124	52	15	1	199
Kepulauan Sula	51	5	18	0	80
Pulau Morotai	72	8	1	0	88
Pulau Taliabu	15	5	38	0	71
Ternate	77	1	0	0	78
Tidore Kepulauan	77	5	7	0	90
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>752</b>	<b>144</b>	<b>159</b>	<b>1</b>	<b>1199</b>

**TABEL 6.3. BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN SINYAL TELEPON SELULER/HANDPHONE DI SEBAGIAN BESAR WILAYAH DESA/KELURAHAN**

Kabupaten/Kota	Sinyal sangat kuat	Sinyal kuat	Sinyal lemah	Tidak ada sinyal	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Halmahera Barat	9	66	77	17	169
Halmahera Selatan	7	84	139	26	256
Halmahera Tengah	1	12	41	10	64
Halmahera Timur	7	41	41	15	104
Halmahera Utara	56	44	73	26	199
Kepulauan Sula	5	25	41	9	80
Pulau Morotai	19	46	23	0	88
Pulau Taliabu	12	11	39	9	71
Ternate	40	21	14	3	78
Tidore Kepulauan	30	23	37	0	90
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>186</b>	<b>373</b>	<b>525</b>	<b>115</b>	<b>1199</b>

# 7

# EKONOMI



BANYAKNYA DESA/KELURAHAN YANG TIDAK TERDAPAT KELOMPOK PETOKOAN/PASAR

Halmahera Selatan	244
Halmahera Utara	181
Halmahera Barat	158
Halmahera Timur	91
Pulau Morotai	80
Tidore Kepulauan	80
Ternate	69
Kepulauan Sula	68
Pulau Taliabu	63
Halmahera Tengah	56





## Penjelasan Teknis Angkutan, Komunikasi dan Informasi

1. **Koperasi** adalah badan usaha usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip:
  - a. Keanggotaannya sukarela dan terbuka;
  - b. Pengelolaannya dilakukan secara demokratis;
  - c. Pembagian sisa hasil usahanya dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
  - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
  - e. Kemandirian, serta sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang ber dasarkan atas azas kekeluargaan.
2. **Kelompok Pertokoan** adalah sejumlah toko yang terdiri dari minimal sepuluh toko dan mengelompok. Dalam satu kelompok pertokoan, jumlah bangunan fisiknya bisa lebih dari satu.
3. **Pasar dengan Bangunan Permanen/Semi Permanen** adalah pasar yang menggunakan bangunan tetap dan memiliki lantai, atap, baik berdinding maupun tidak.
4. **Pasar Tanpa Bangunan** adalah pasar yang tidak berada dalam bangunan, termasuk pasar terapung.
5. **Bank** adalah badan usaha yang meng- himpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
6. **Bank Umum** adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan).

7. **Bank Perkreditan Rakyat** adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

**TABEL 7.1. BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT KEBERADAAN KOPERASI**

<b>Kabupaten/Kota</b>	Koperasi Unit Desa	Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat	Koperasi Simpan Pinjam	Koperasi Lainnya
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Halmahera Barat	5	0	10	2
Halmahera Selatan	5	6	15	8
Halmahera Tengah	0	0	3	1
Halmahera Timur	0	0	2	1
Halmahera Utara	7	8	17	5
Kepulauan Sula	3	3	6	1
Pulau Morotai	14	2	5	29
Pulau Taliabu	1	0	1	3
Ternate	2	1	22	1
Tidore Kepulauan	1	0	13	1
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>94</b>	<b>52</b>

**TABEL 7.2 . BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT  
KEBERADAAN KELOMPOK PERTOKOAN DAN PASAR**

Kabupaten/Kota	Kelompok Pertokoan	Pasar Permanen	Pasar Semi Permanen	Tidak Ada Kelompok Petokoan dan Pasar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Halmahera Barat	4	8	9	158
Halmahera Selatan	4	4	11	244
Halmahera Tengah	0	4	5	56
Halmahera Timur	0	7	7	91
Halmahera Utara	7	7	9	181
Kepulauan Sula	7	7	3	68
Pulau Morotai	2	1	6	80
Pulau Taliabu	1	6	4	63
Ternate	4	7	1	69
Tidore Kepulauan	2	5	9	80
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>31</b>	<b>56</b>	<b>64</b>	<b>1090</b>

**TABEL 7.3. BANYAKNYA DESA/KELURAHAN MENURUT  
KEBERADAAN BANK**

Kabupaten/Kota	Bank Umum Pemerintah	Bank Umum Swasta	Bank Perkreditan Rakyat
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	7	2	1
Halmahera Selatan	5	1	0
Halmahera Tengah	3	0	0
Halmahera Timur	4	0	0
Halmahera Utara	4	1	1
Kepulauan Sula	4	1	1
Pulau Morotai	3	0	0
Pulau Taliabu	1	0	0
Ternate	8	6	5
Tidore Kepulauan	8	2	2
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>47</b>	<b>13</b>	<b>10</b>



# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI MALUKU UTARA**

Jalan Stadion No.65, Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate  
Telp. (0921) 312 7878, Fax. (0921) 3126301, Email : [bps8200@bps.go.id](mailto:bps8200@bps.go.id)  
Homepage : <http://malut.bps.go.id>

